

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan yang dialami Perempuan menjadi isu sosial yang sangat kompleks hingga saat ini. Meskipun pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah berupaya dalam melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, tetapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut masih sering terjadi. Kekerasan pada perempuan bukan hanya menjadi persoalan individual ataupun nasional, tetapi menjadi persoalan global. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya dialami di Indonesia namun hampir seluruh negara perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan (Oli'i & Donri, 2023). Adapun data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA RI) tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Syaroh Iwanda Lubis & Purba, 2023).

Kekerasan perempuan adalah segala sesuatu perilaku yang mengakibatkan penderitaan dan penyiksaan secara fisik, psikologis, mental, dan seksual (Muhammad Jadi, 2021). Definisi kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai bentuk perlakuan yang tentu mengarah pada fisik, emosional, dan eksploitasi yang dapat membahayakan mental perempuan (Ginting et al., 2022). Adapun data dari Kementrian PPA tentang masalah kekerasan pada perempuan.



Diagram 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tingkat Nasional Tahun 2023

Sumber data : Kementerian PPPA RI, 2023

Bedasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 menempati posisi ke-9 dari 10 Provinsi dengan tingkat kasus kekerasan tertinggi di Indonesia. Dari hasil data, Provinsi Jawa Timur sebanyak 482 kasus kekerasan terhadap Perempuan. Data diatas menunjukkan fakta bahwa Jawa Timur masih termasuk Provinsi dengan tingkat kekerasan terhadap Perempuan. Sesuai dengan kajian penelitian terkait kekerasan peneliti fokus pembahasan hanya mencakup di Jawa Timur. Karena, hingga saat ini masih mengalami tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mengupayakan penurunan tingkat kekerasan di Jawa Timur dengan menegakkan peraturan atau kebijakan. Melalui DP3AK provinsi Jawa Timur dapat membuat program kebijakan sebagai bentuk layanan serta meminimalisir terjadinya kekerasan dengan cara mengantisipasi secara mandiri kepada perempuan melalui sosialisasi (Muhammad Jadi, 2021).

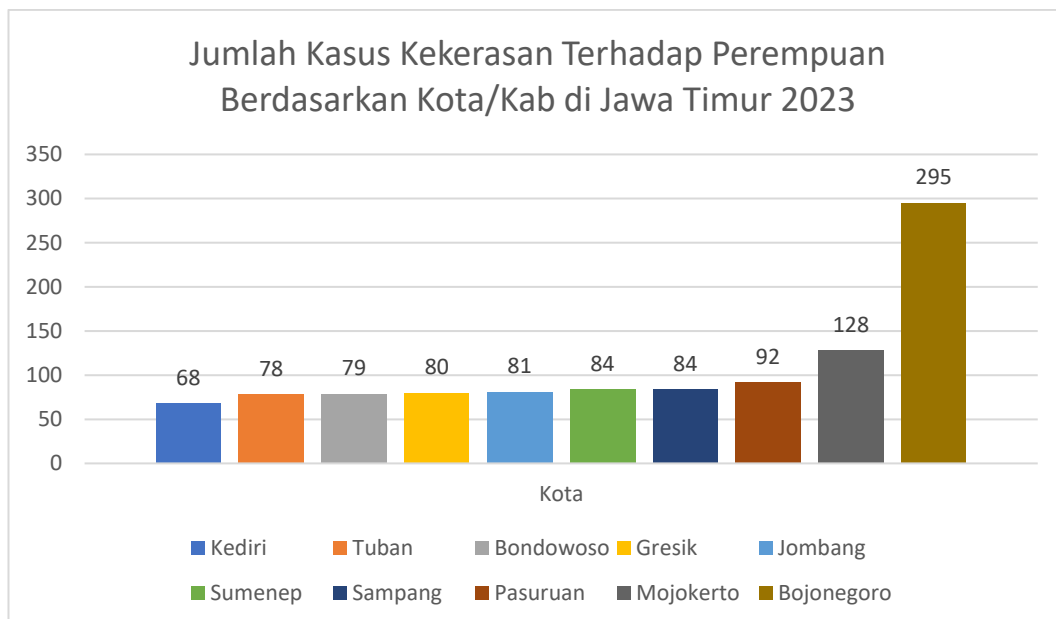


Diagram 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Kota/Kab di Jawa Timur 2023

Sumber data : BPS Statistik, 2023

Diagram diatas menunjukkan jika banyak perempuan yang mengalami kekerasan banyak terjadi di kota-kota Jawa Timur. Di kabupaten/kota Bojonegoro mengalami banyak kasus kekerasan dengan jumlah 295 laporan yang terdata. Faktor yang menjadi penyebab pemicu tingkat kekerasan karena masih lemahnya hukuman pada pelaku kekerasan dan kurang pengetahuan masyarakat harus lapor dimana. Adapun korban yang masih malu atau tidak berani melapor atau sudah melaporkan tetapi lebih memilih dalam damai. Sehingga, sebagian dari mereka menganggap bahwa kekerasan itu masalah keluarga dan aib maka harus ditutupi. Tetapi, justru membangkitkan pelaku untuk melakukan kekerasan lagi tanpa takut akan konsekuensinya karena pada akhirnya korban memilih jalan damai.

Beberapa kota yang tertera di data tersebut menunjukkan perhatian dan respon dari pemerintah daerah baik tingkat kabupaten/Kota di Jawa Timur. Tidak cukup jika hanya menegakkan peraturan perundang-undangan tetapi juga menerapkan dengan melakukan koordinasi dan komunikasi mencakup urusan pusat hingga daerah dalam pelaksanaan kebijakan turunan yang ditetapkan oleh Presiden dan Kementerian. Seperti yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur, memberikan layanan dasar dan program kebijakan guna meminimalisir dan menurunkan kekerasan terhadap Perempuan. Adapun jenis kekerasan pada

perempuan yang kerap kali terjadi yakni kekerasan seksual dengan berbagai cara salah satunya menyentuh dengan modus, memaksa berhubungan seksual atau melakukan tindakan yang mengarah pada seksual, serta diancam untuk memaksa memperlihatkan bagian tubuh atau di eksploitasi.

Lalu, kekerasan psikis terjadi ketika seseorang melakukan pengancaman atau mengintimidasi perempuan dengan mengisolasi dari keluarga maupun dari teman (Saenab, 2021). Kekerasan emosional tentu berkaitan atau terhubung dengan kondisi psikis korban. Hal tersebut dimulai dengan perkataan dan perbuatan yang membuat perempuan itu terlihat bodoh dan merasa tidak berharga. Lalu, memprovokasi dengan menyalahkan semua masalah keluarga yang terjadi disebabkan oleh korban dan mempermalukan di depan orang lain. Berikut jumlah kekerasan di Provinsi Jawa Timur!

Grafik 1.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023



Sumber: DP3AK Provinsi Jawa Timur, 2023

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan data jumlah angka kekerasan terhadap perempuan. Dari tahun 2019 hingga tahun 2022 terjadi peningkatan cukup tinggi. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 dimana perekonomian sedang menurun serta pemerintah membatasi masyarakat untuk berkegiatan di luar rumah. Sehingga, yang terjadi adalah mereka tidak bisa bekerja serta banyak dari mereka korban PHK masal dari perusahaan. Pada tahun 2023 mengalami penurunan karena pasca covid kondisi sudah menjadi lebih baik masyarakat sudah melakukan aktivitasnya dan bekerja di luar rumah. Meskipun mengalami penurunan tahun 2023 tetapi masih terjadi kekerasan terhadap perempuan. Tidak hanya dalam

lingkung rumah tangga tetapi juga di lingkungan sosial yang mendapatkan perlakuan kurang baik. Lalu, DP3AK Provinsi Jawa Timur membentuk program GASPOL dengan tujuan untuk menjadikan perempuan lebih kuat dan mandiri. Karena, banyak Perempuan yang memilih bekerja sebagai ojek online justru mendapat perhatian khusus. Program GASPOL mencakup kegiatan pelatihan agar mereka punya keahlian lain selain menyeter.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, pada pasal 12 ayat (2) pada poin (b) berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yaitu dengan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan. Komitmen pemerintah terkait Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat pada Pada Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Kerjasama Penyembuhan KDRT guna Menangani terkait kekerasan perempuan. Peraturan Presiden No 65 Tahun 2020 yang dirubah menjadi PP No 7 Tahun 2023 tentang Kementerian PPA, khususnya pasal 3 huruf (d) terkait ketersediaan pelayanan rujukan akhir untuk korban kekerasan yang diperlukan untuk koordinasi secara nasional, lintas provinsi, dan Internasional. Hal ini, Perpres telah mendelegasikan dua fungsi baru Kementerian PPA sebagai bentuk komitmen pemerintah. Kementerian PPA menetapkan peraturan No 2 Tahun 2022 tentang Ukuran Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang harus di terapkan tingkat nasional dan lintas provinsi. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta dilaksanakan melalui DP3AK dengan mengeluarkan program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) sebagai layanan untuk Perempuan. Untuk pelaksanaan teknisnya mengacu pada Peraturan Gubernur Jatim No 1 Tahun 2021 Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis DP3AK Provinsi Jawa Timur (Fauziah & Adam, 2025).

Adapun kekerasan seksual salah satunya terjadi pada ojol perempuan yang bekerja karena adanya tuntutan ekonomi sehingga mengharuskan mereka bekerja sebagai ojol (Ali et al., 2023). Dalam hal ini, Gubernur Jawa Timur mengamanatkan pada DP3AK Provinsi Jawa Timur melakukan pertemuan dan menghadirkan Perempuan Pengemudi ojek online menjadi dasar dari terbentuknya GASPOL (Gerakan Sayang Perempuan Ojek online). Karena, tuntutan ekonomi menjadi

solusi perempuan memilih menjadi ojek online untuk menghidupi keluarga dan sembari mengurus anak, suami yang tengah sakit, orang tua yang sudah sepuh. Dengan menjadi ojek online mereka bisa memenuhi kebutuhan setiap hari sekaligus bisa mengurus rumah tangganya(Zulfiani et al., 2019).

Namun yang menjadi kekhawatiran adalah soal kemanan ketika sedang bekerja, karena sangat beresiko mengalami kekerasan secara fisik maupun non-fisik (Salamor & Salamor, 2022). Maka dari itu, target dari program GASPOL adalah untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan perempuan ojek online berkesempatan agar bisa mengembangkan diri, mandiri, dan berakhlak. Dengan melibatkan beberapa *stakeholder* untuk memberikan pembinaan, memberikan pengetahuan tentang hukum atau kebijakan, memberikan konseling bagi korban yang mengalami kekerasan dalam bentuk kdrt ataupun pelecehan seksual. Sehingga, nantinya akan terbentuk mental dan pribadi yang lebih berani dan dapat mengantisipasi diri (Abdurrahman, 2021).

DP3AK Provinsi Jawa Timur melibatkan pemangku kepentingan dalam memberikan layanan melalui UPT PPPA sebagai wadah untuk melakukan pembinaan literasi dan pemberdayaan kepada Perempuan. Tujuan memberdayakan perempuan adalah agar menjadi pribadi yang lebih kuat dan berani ketika menghadapi kekerasan. Maka pentingnya memberikan pelayanan yang berbasis pembelajaran keluarga dan pendidikan untuk perempuan (Almahdali, 2023). Lalu, DP3AK Provinsi harus memberikan layanan penghubung rujukan sebagai solusi dari permasalahan di keluarga maupun dilingkungan sekitar. Serta, harus melakukan pelaporan hasil kepada kepala DP3AK Tingkat Kabupaten maupun Kota di Jawa Timur setiap bulan. Kasus kekerasan terhadap Perempuan semakin meningkat setiap tahun, karena sebelumnya belum ada wadah atau platform untuk melaporkan kasus tersebut. Serta, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU dan Peraturan Daerah mengenai perlindungan perempuan (Farid, 2019).

Dengan adanya pada program GASPOL tersebut menjadi salah satu sinergi pemerintah daerah untuk menerapkan dan memastikan bahwa dalam proses penyelenggaraan organisasi perempuan dapat terlaksana dengan baik serta diterima oleh masyarakat khususnya perempuan. Karena memiliki peran penting, tidak hanya sebagai pendamping korban tetapi juga melakukan pembinaan terhadap perempuan

seperti driver atau ojol perempuan tujuannya untuk menyetarakan gender dengan memberikan bimbingan dalam meningkatkan sikap berani dan melawan terhadap pelaku kekerasan. Dengan membentuk pribadi yang lebih berani terhadap Perempuan dapat membantu dan memitigasi adanya kekerasan. (Kristian, 2023).

Selain keterlibatan organisasi perempuan sebagai media edukasi, konseling dan lain sebagainya. Adapun lembaga akademisi untuk memberikan pengetahuan tentang politik dan hukum dari Unair, serta Tim Jujitsu yang memberikan pelatihan bela diri pada ojol perempuan. Dengan begitu, akan menjadi lebih bersinergi dalam melaksanakan program GASPOL tersebut yang menjadi alternatif dalam upaya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan Jawa Timur. Karena, tidak hanya memastikan perlindungan terhadap perempuan tetapi juga memastikan apakah mereka berdaya. Pada program GASPOL juga membantu dalam memberikan perawatan psikologis bagi korban yang mengalami kekerasan melalui UPT PPPA (Pramono, 2020). Serta, dengan meningkatnya rasa kepedulian dan tingkat pemahaman tentang hukum membuat perempuan lebih kuat dan setara dalam hal perpektif ketimpangan norma di masyarakat. Berawal dari kerjasama dengan berbagai pihak, peneliti ingin mengetahui apakah dari kerjasama tersebut sudah berjalan secara efektif dan terarah. Maka dari itu, penelitian ini perlu peneliti lakukan;

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih dalam penelitian dengan judul **“Implementai Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) Sebagai Upaya Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan di Provinsi Jawa Timur“**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai gambaran yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengangkat rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

- a. Bagaimana Implementasi Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) Sebagai Upaya Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan di Provinsi Jawa Timur?
- b. Apakah permasalahan yang dihadapi dalam Implementasi Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) Sebagai Upaya Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan di Provinsi Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan hasil rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menganalisis Implementasi Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) Sebagai Upaya Menurunkan Kekerasan pada Perempuan di Provinsi Jawa Timur.
- b. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam Implementasi Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) Sebagai Upaya Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan riset ini memiliki manfaat yang terbagi menjadi dua yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini yakni mampu memberikan kontribusi bagi pembaharuan ilmu terutama Studi Ilmu Pemerintahan. Serta, dapat menjadi bahan acuan pada penelitian mata kuliah Kebijakan Sektor Publik. Dalam hal ini terkait Implementasi Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) Sebagai Upaya Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan di Provinsi Jawa Timur.

1.4.2 Manfaat Praktis

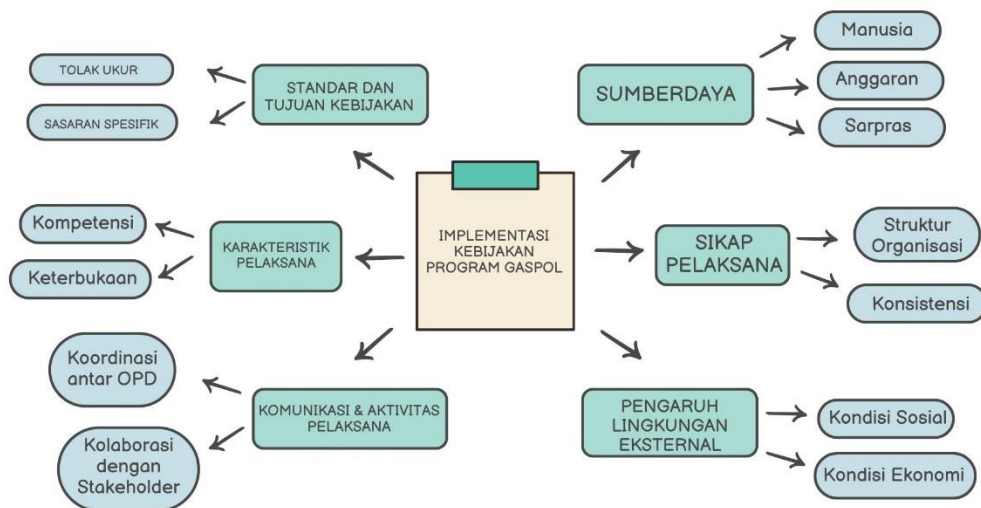
Dapat menambah wawasan keilmuan perihal implementasi Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL). Manfaat praktis bagi Mahasiswa adalah dapat memperoleh pengalaman yang nyata dilapangan, dengan mengetahui proses implementasi kebijakan GASPOL di Jawa Timur. Dengan adanya penelitian di DP3AK dapat bermanfaat sebagai bahan diskusi dan sebagai bahan evaluasi terkait proses implementasi program tersebut. Serta, mempererat hubungan dengan institusi DP3AK dapat memperluas jaringan dan dapat memperoleh akses sumber informasi yang lebih luas di masa mendatang.

1.5 Definisi Konseptual

Peneliti menggambarkan konsep yang akan diterapkan ke dalam riset tersebut. konsep pada setiap variable judul dalam penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi Kebijakan

Pengertian Implementasi kebijakan dalam teori Van Meter dan Van Horn (1980) secara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan sesuai dengan apa yang telah diformulasikan dalam suatu kebijakan (Prambudi Adha et al., 2022). Teori tersebut telah diformulasikan dengan sebutan *A Model of The Policy Implementation*. Dalam kajian penelitian terkait implementasi kebijakan program GASPOL dalam menurunkan kekerasan terhadap Perempuan, menggunakan model teori Van Meter Van Horn karena melihat dari proses implementasi menjadi konsep dasar sebuah penerapan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai hasil kinerja implementasi *public policy* yang terhubung dengan berbagai variable. Model teori tersebut menggambarkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara lurus, bertahap dan sesuai pola yang konsisten mulai dari Ketetapan politik, penerapan, dan hasil peforma kebijakan publik (Arbiani et al., 2019).



Mind map 1.1 Implementasi Kebijakan Menurut Teori Van Metter dan Van Horn
Sumber: Diolah oleh peneliti, Tahun 2024

Standar dan Tujuan Kebijakan, capaian implementasi kebijakan berdasarkan tingkat keberhasilan diukur dengan kebijakan yang faktual atau sesuai pada kondisi

sosial budaya di tingkat penyelenggara kebijakan. Apabila terlalu ideal untuk dilaksanakan di tingkat masyarakat, yang terjadi akan sulit untuk mencapai di tingkat keberhasilan kebijakan. Dalam hal ini, Standar dan Tujuan kebijakan dapat dilihat dari tolak ukur program yang di dalamnya memuat tentang regulasi sebagai ukuran untuk melaksanakan program. Serta, sasaran spesifik yang dicapai didalamnya memuat pedoman program yang menjadi fokus pelaksana agar mewujudkan keberhasilan (Faradipa et al, 2024).

Ketersediaan Sumberdaya menjadi pendorong untuk mencapai keberhasilan sebuah program kebijakan. Implementasi kebijakan berlandaskan pada kapasitas untuk menggunakan sumberdaya yang ada. Manusia ditetapkan menjadi sumberdaya yang terpenting sebagai penentu proses keberhasilan kebijakan. Prosedur tertentu dari serangkaian seluruh proses kebijakan menetapkan adanya sumberdaya manusia yang berkualitas. Sumber anggaran yang memadai, dan Sarana dan prasarana untuk mendukung program tersebut. Tetapi jika kompetensi dari sumber daya tersebut tidak ada, maka kinerja kebijakan publik minim terjadi keberhasilan.

Karakteristik Agen Pelaksana, fokus utama dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah pihak atau Lembaga yang menjalankannya, hal ini mencakup organisasi formal dan informal yang terlibat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan kesesuaian beberapa pihak sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana kebijakan maka diperlukan pelaksana kebijakan yang *kompetable* sehingga program dapat terlaksana dengan baik. Seperti, penerapan kebijakan berupaya dengan mengubah *mindset* agar lebih berkembang dan mengubah perilaku manusia untuk lebih baik, maka agen pelaksana program itu harus tegas sesuai aturan yang ditetapkan.

Sikap atau kecenderungan para pelaksana, hal ini sangat berpengaruh pada capaian keberhasilan atau tidaknya performa kebijakan publik. biasanya kebijakan yang dari atas itu bukan dari masyarakat yang dengan benar memahami permasalahan yang terjadi. Maka yang terjadi, para pelaksana menjalankan kebijakan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan yang diharapkan masyarakat karena pembuat kebijakan tidak tahu atau bahkan kurang peduli dengan kondisi nyata yang dialami masyarakatnya. Dengan adanya program

tersebut yang fokus pada pemberdayaan perempuan sesuai dengan pemenuhan hak perempuan. Maka, pelaksana program maupun anggota yang terlibat harus konsisten untuk menerapkan program tersebut dengan optimal.

Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, Koordinasi menjadi metode untuk menerapkan sebuah program. Semua pihak yang terlibat harus dipastikan konsisten dan terkoordinir. Hal ini, memudahkan dalam menerapkan kebijakan dan mengurangi adanya kesalahan. Serta, keberhasilan suatu program dengan melakukan kolaborasi dengan *stakeholder* dengan begitu program berjalan dengan efektif dan efisien karena ada dukungan dari berbagai pihak.

Lingkungan Sosial dan Ekonomi sangat berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Jika melihat lingkungan di luar pemerintah, seperti kondisi sosial ekonomi yang kurang memadai serta berpotensi terjadinya kegagalan pada implementasi kebijakan. Maka dari itu, pelaksana kebijakan harus mempertimbangkan apakah situasi di lingkungan eksternal tersebut mendukung atau tidak baik secara sosial dan ekonomi.

Relasi antara teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1980) dengan penelitian terkait implementasi Program GASPOL adalah melekat pada pelaksanaan proses program. Dalam penelitian Program GASPOL terdapat beberapa kegiatan pelatihan yang menjadi fokus utama apakah pelatihan tersebut memberikan dampak bagi anggota GASPOL. Adapun enam indikator dalam Teori tersebut yang menjadi acuan, apakah program sudah sesuai dengan kinerja kebijakan publik. Dengan melakukan observasi ketika kegiatan GASPOL berlangsung maka dapat mengidentifikasi.

2. Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL)

Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) adalah bentuk layanan dalam rangka pemenuhan hak perempuan dengan memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan agar bisa mengembangkan diri dan untuk dapat mandiri dalam hal mengantisipasi diri. Program GASPOL merupakan bentuk penerapan kebijakan yang diturunkan kepada pemerintah daerah. Sesuai dengan, UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, pada pasal 12 ayat (2) pada poin (b) berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yaitu dengan melakukan pemberdayaan terhadap Perempuan. Peraturan Kementerian PPA No 2 Tahun 2022

tentang Ukuran Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang harus di terapkan tingkat nasional dan lintas provinsi. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan PERDA No 9 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan PPA Korban Kekerasan serta dilaksanakan melalui DP3AK dengan mengeluarkan inovasi program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) sebagai layanan untuk Perempuan. Untuk pelaksanaan teknisnya DP3Ak Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Gubernur Jatim Nomor 1 Tahun 2021 struktur Organisasi, penjabaran Tusi serta Tata Kerja UPT DP3AK Provinsi Jawa Timur.

3. Kekerasan Terhadap Perempuan

Menurut Johan Galtung menjelaskan tindakan kekerasan terhadap perempuan termasuk ke dalam masalah sosial, budaya, politik, ekonomi dan aspek lainnya. Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi ketika ada ketimpangan ekonomi. Dalam penyelesaian masalah rumah tangga dilakukan dengan kekerasan itu karena adanya dominasi laki-laki. Jika perempuan memiliki peran dan kekuasaan di ranah publik, didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat, perlindungan sosial, dan control yang kuat maka indikasi perempuan mengalami kekerasan akan lebih rendah (Dwi Eriyanti, 2017).

Usaha untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan tentu harus mendapat respon dan penanganan yang utama. Langkah yang dilaksanakan untuk menangani persoalan ini mengandung unsur *integrated*, serta langkah hukum tentu untuk mengamati langkah non hukum yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan kesadaran perempuan tentang hak legal dan kewajiban normatif yang melekat dalam hukum, terkait pentingnya memberikan penanganan pada korban kekerasan, mendorong penegak hukum untuk mengatasi kasus kekerasan secepat mungkin, dan melakukan pembaruan system pelayanan kesehatan dalam rangka menangani kekerasan terhadap perempuan.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional menjadi arahan yang lengkap tentang hal yang perlu dievaluasi atau diobservasi pada variable mengkaji agar lebih sempurna. Berikut model Impelementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1980):

A. Implementasi Program GASPOL di Provinsi Jawa Timur

1. Standar dan Tujuan Kebijakan Program GASPOL di Jawa Timur
 - 1.1 Tolak ukur program GASPOL
 - 1.2 Sasaran spesifik yang akan dicapai
2. Sumberdaya Program GASPOL di Jawa Timur
 - 2.1 Ketersediaan SDM pelaksana program GASPOL
 - 2.2 Sumber anggaran program GASPOL
 - 2.3 Dukungan sarana dan prasarana GASPOL
3. Karakteristik Agen Pelaksana Program GASPOL di Jawa Timur
 - 3.1 Kompetensi pelaksana program GASPOL
 - 3.2 Keterbukaan Komunikasi
4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana Program GASPOL di Jawa Timur
 - 4.1 Kejelasan Struktur Organisasi
 - 4.2 Konsistensi dalam pelaksanaan program GASPOL (SOP)
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Program GASPOL di Jawa Timur
 - 5.1 Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 - 5.2 Kolaborasi dengan *stakeholder*
6. Pengaruh Lingkungan Eksternal Program GASPOL di Jawa Timur
 - 6.1 Kondisi sosial pelaksanaan Program GASPOL
 - 6.2 Kondisi ekonomi pelaksanaan program GASPOL

B. Permasalahan dalam Implementasi Program GASPOL di Provinsi Jawa Timur

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian termasuk kedalam pendekatan yang dirancang secara sistematis sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, dibutuhkan metode untuk mendukung peneliti dalam mendapatkan data valid dan nyata. Adapun teknik penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini diuraikan, yaitu:

1.7.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian Keterlibatan *Stakeholder* dalam Pelaksanaan Program GASPOL Upaya Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan analisis tanpa menggunakan statistik dalam proses pengolahannya. Menurut (Denzin & Lincoln, 1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dalam konteks ilmiah adalah untuk memahami dan menafsirkan fenomena yang terjadi, dengan memanfaatkan berbagai cara yang relevan. Sementara penelitian deskriptif analitis merupakan bentuk penelitian yang berfokus untuk menggambarkan dan menjelaskan objek yang diteliti dengan adanya berdasarkan data dan sampel yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis riset deskriptif analitis, untuk memberikan gambaran secara terstruktur, nyata dan akurat sesuai dengan apa yang didapatkan di lapangan. Keterlibatan *Stakeholder* dalam Pelaksanaan Program GASPOL sebagai upaya strategis dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur, melalui pendekatan kualitatif agar peneliti menggambarkan secara mendalam antara karakter dan relasi terhadap peristiwa kekerasan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi peran para pemangku kepentingan yang bermitra dengan DP3AK dalam pelaksanaan GASPOL.

1.7.2 Sumber data

Untuk meneliti dan menelaah dalam penelitian mengenai intensitas komunikasi dalam penyelenggaraan Implementasi Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) Upaya Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi Jawa Timur, penulis berupaya untuk memperoleh data menggunakan dua sumber data, yakni:

a. Sumber Data Primer

Mendapatkan data primer dilakukan dengan langsung pada informan aslinya. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang berasal dari beberapa pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program GASPOL. Peneliti berupaya untuk mendapatkan sumber informasi tentang bagaimana pemahaman mereka mengenai proses penyelenggaraan, Prinsip program Gaspol, tokoh yang terlibat, serta pengaruh Program GASPOL terhadap penurunan angka

kekerasan perempuan di Jawa Timur. Dalam hal ini, data yang diperoleh peneliti berasal dari informan Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur dan Tim Petugas GASPOL dalam upaya penurunan angka kekerasan terhadap perempuan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dihasilkan dari berbagai informasi sebelumnya yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, baik dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Informasi ini mencakup gambaran mengenai implementasi program GASPOL dalam upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan. Data sekunder dimanfaatkan oleh peneliti untuk memperkuat analisis serta mendukung temuan yang dihasilkan bersumber pada data primer. Jenis data ini yang digunakan mencakup dokumen resmi, arsip buku, literatur ilmiah, surat kabar, majalah, serta informasi yang tersedia melalui internet yang relevan dengan fenomena sosial kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini tentu narasumber yang dapat memberikan data maupun informasi terkait hal yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini meliputi Kepala DP3AK, Kepala Bidang perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga (PPKK), Tim Petugas GASPOL, dan anggota GASPOL Provinsi Jawa Timur sebagai pihak penyelenggara program kemandirian Perempuan dalam upaya penurunan angka korban kekerasan terhadap Perempuan Jawa Timur.

1.7.4 Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan riset ini dilaksanakan di Kota Surabaya dan lebih tepatnya pada Kantor DP3AK Provinsi Jawa Timur yang akan dilakukan pada saat riset pemerintahan selama empat bulan terhitung dari tanggal 15 Juli hingga 15 November 2024.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari lapangan secara tepat dan akurat sesuai dengan realita yang terjadi. Demikian data yang

ditemukan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Lalu, metode pengumpulan data menurut Sugiyono (2016) yang diaplikasikan pada riset ini adalah :

a. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi sebuah rekaman peristiwa baik berupa gambar maupun tulisan, serta pendapat para ahli yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk memahami dan menelaah permasalahan. Dalam suatu penelitian, dokumentasi berperan dalam membantu peneliti menyusun hasil penelitian secara lebih konkrit. Teknik dokumentasi akan menghasilkan informasi umum mengenai struktur organisasi serta data personal dari pihak-pihak pemangku kepentingan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode berdialog digunakan untuk memperoleh keterangan dengan cara menjawab pertanyaan. Dalam hal ini, untuk menghimpun data baik dalam proses studi pendahuluan maupun untuk menggali informasi secara lebih mendalam dari para informan didapatkan melalui wawancara. Penghimpunan data dilakukan melalui wawancara dengan Kepala DP3AK dan tim pelaksana Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) Upaya Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi Jawa Timur.

c. Observasi

Observasi menjadi teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana prosesnya melibatkan indera penglihatan, pendengaran bahkan penciuman dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dengan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi fakta-fakta serta realitas yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan secara langsung dengan keterlibatan aktif peneliti sebagai partisipan untuk menambah pemahaman lebih mendalam terkait kajian riset.

Langkah awal observasi dengan terjun langsung pada DP3AK Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati fakta di lapangan, berkomunikasi, serta melakukan validasi terhadap data awal

Bersama Kepala Dinas. Selanjutnya, peneliti melanjutkan proses observasi dengan mencermati serta membandingkan antara kondisi nyata yang dialami oleh pemangku kepentingan dengan temuan awal dari pra-observasi yang telah dilakukan sebelumnya.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Bertujuan untuk menghimpun informasi yang berkaitan dengan komunikasi pemerintahan dalam pelaksanaan program GASPOL sebagai upaya menurunkan kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur. Observasi dilakukan guna memverifikasi dan memperjelas data yang dihasilkan. Oleh karena itu, kajian data yang diterapkan menurut Miles dan Huberman (1992) ada tiga model metode analisis data yang digunakan yang mencakup :

a. Reduksi Data

Dalam tahapan menyaring, merangkum, dan terpusat untuk informasi yang relevan dari hasil wawancara dengan pihak yang menjadi objek kajian. Dari data primer dan sekunder yang dihasilkan dan disaring berdasarkan berbagai sumber sesuai dengan fokus kajian. Tujuannya adalah untuk menyoroti informasi yang dianggap penting untuk memperkuat hasil dan pembahasan terkait Implementasi Program GASPOL di Jawa Timur.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dalam penelitian ini disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang dilengkapi dengan tabel, diagram, serta data dan gambar pendukung lainnya. Peneliti menguraikan hasil wawancara dengan informasi yang ditelaah dan ditetapkan berdasarkan indikator serta peristiwa sosial terkait kekerasan pada perempuan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan dan membandingkan antardata secara sistematis guna memperoleh temuan dengan kurasi yang tepat. Ringkasan hasil awal terlihat tentatif hingga didukung oleh bukti yang linier selama pengumpulan data pada konteks nyata. Maka, peneliti perlu menghimpun data yang kredibel dan sesuai

agar kesimpulan akhir disusun dengan memiliki dasar empirik yang dapat dipertanggungjawabkan.

